

**ANALISIS DAMPAK ILLEGAL FISHING TERHADAP PRODUKSI TANGKAPAN  
NELAYAN PERAIRAN UMUM DI KABUPATEN BARITO KUALA  
KALIMANTAN SELATAN**

**Impact Analysis of Illegal Fishing Toward Capture Production of Public Waters  
Fishermen in Barito Kuala Regency, South Kalimantan**

Fatimah<sup>1)</sup>, Idiannor Mahyudin<sup>2)</sup>, Erma Agusliani<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Ilmu Perikanan Program Pascasarjana  
Universitas Lambung Mangkurat

<sup>2)</sup> Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat

**Abstract**

This study aims to (1) analyze the institutional capacity of fisheries surveillance in Barito Kuala regency; (2) analyze community participation in addressing the problems of illegal fishing; and (3) comparing the level of income of fishing communities before and after the formation of Pokmaswas against illegal fishing in Barito Kuala regency. The study activities carried out at Jejangkit Pasar Village, Jejangkit District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan, with the object of research of Pokmaswas Berkat Bersama. The data collected were data sourced directly from the observation in the study location and other supporting data related to the study object. Data analyzed with descriptive and paired t – test to compare the capture production before and after illegal fishing. The results showed that Barito Kuala regency had facilities that were intended for fish resource monitoring through patrols, conducting enforcement by regulatory authorities for fisheries, socialization of surveillance system of society based (SISWASMAS) but violations still occurred so that they gave the impression of ineffectiveness or not optimal surveillance activities undertaken in the prevention and treatment of illegal fishing, due to the lack of public understanding factors as well as economy factors. The level of participation of fishermen of Pokmaswas Berkat Bersama in the supervision of fishery resources was quite high, judging from the attitude of fishermen of Pokmaswas Berkat Bersama who mostly reported to the supervising apparatus when they saw illegal fishing activities, rebuked and advised, and ever discussed the issue of illegal fishing with their friends and were willing if they are involved in a meeting that discussed the illegal fishing. Results of the statistical analysis showed highly significant differences in capture production between before and after the occurrence of illegal fishing, where the fishermen average capture production of Pokmaswas Berkat Bersama of 2005 was 12.631 kg; after illegal fishing in 2014 it was 3.642 kg, so it was decreased by 58%.

*Keywords : illegal fishing, surveillance of fishery resources, capture production*

**PENDAHULUAN**

Salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi penangkapan di perairan umum adalah Kabupaten Barito Kuala dengan Ibu Kota Marabahan, yang merupakan salah satu kabupaten dari 13 kabupaten/kota di

wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di bagian paling barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2.996,96 km<sup>2</sup> atau sebesar 7,99 % dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, serta mempunyai 17 kecamatan. (Diskanlut Kab. Batola, 2014).

Potensi sumberdaya ikan di Kabupaten Barito Kuala tidak akan terjaga kelestariannya apabila usaha pemanfaatannya berupa penangkapan ikan baik di perairan umum dan laut menggunakan cara-cara dan bahan-bahan yang dilarang dan berbahaya. Hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup dari berbagai jenis ikan dan biota perairan-perairan lainnya.

Dalam Upaya menjaga dan pelestarian sumberdaya perikanan di Kabupaten Barito Kuala diperlukan keikutsertaan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pengendalian atas terjadinya pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tidak terkendali diwilayahnya.. Pokmaswas bertugas melakukan pengawasan dan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Keberadaan Pokmaswas dalam pengawasan SDKP sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi *illegal fishing*.

#### *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang diatas dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan *illegal fishing* dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan di perairan Kabupaten Barito Kuala.
2. Seberapa optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan *illegal fishing* di Kabupaten Barito Kuala.
3. Apakah larangan *illegal fishing* di Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi tangkapan nelayan.

#### *Tujuan Penelitian*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis kapasitas kelembagaan pengawasan perikanan di perairan Kabupaten Batola.

2. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam permasalahan *illegal fishing*.
3. Membandingkan tingkat produksi tangkapan nelayan sebelum dan sesudah terbentuknya Pokmaswas terhadap *illegal fishing* di Kabupaten Batola.

#### **METODE PENELITIAN**

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan obyek penelitian Pokmaswas Berkat Bersama. Data yang dikumpulkan adalah data yang bersumber langsung dari hasil observasi di lokasi penelitian, dan data pendukung lainnya terkait dengan obyek penelitian.

Analisis data meliputi:

1. Analisis deskriptif terhadap peran kelembagaan terhadap pelaksanaan pengawasan *illegal fishing* dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan di perairan Kabupaten Barito Kuala.
2. Analisis deskriptif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan *illegal fishing* di Kabupaten Barito Kuala.
3. Uji t berpasangan terhadap tingkat produksi penangkapan nelayan sebelum dan sesudah terbentuknya Pokmaswas terhadap *illegal fishing* di Kabupaten Batola.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### *Karakteristik Responden*

Karakteristik responden Pokmaswas Berkat Bersama di Desa Jejangkit Pasar Kabupaten Batola memiliki beberapa perbedaan antara lain dari segi pendidikan, umur dan pengalaman. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dan usia

No.	Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
<b>A. Pendidikan</b>			
1.	SD	13	37,14
2.	SMP	14	40,00
3.	SMA	8	22,86
Jumlah		35	100
<b>B. Usia (tahun)</b>			
1.	20 – 30	7	20,00
2.	31 – 40	18	51,43
3.	> 40	10	28,57
Jumlah		35	100

Dari tabel 1 dapat dilihat latar belakang pendidikan didominasi pendidikan SMP, hal ini meningkatkan Pokmaswas dalam berinovasi, tetapi pola pikir masih sederhana. Kemudian dalam hal usia responden berkisar 31 – 40 tahun, termasuk usia produktif, dimana responden masih mampu untuk berpikir dan bergerak dinamis dalam menjalankan pekerjaan.

*Pengalaman Usaha Responden*

Kelompok Berkat Bersama ini semua anggotanya mempunyai pekerjaan sebagai petani (pekerjaan utama) sekaligus sebagai nelayan (pekerjaan sambilan/tambahan).

*Analisis Kapasitas Kelembagaan Pengawasan Perikanan Di Perairan Kabupaten Batola*

Pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, diantaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Operasi justicia dan pemberkasan bidang perikanan dan kelautan dilaksanakan dengan tujuan antara lain :

1. Memberikan dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan lainnya.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati perairan.
3. Meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan melalui penggunaan bahan dan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
4. Mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan sumberdaya perikanan.
6. Menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan keanekaragaman hayati perairan dari kepunahan sebagai akibat dari kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak bertanggungjawab.

*Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Menangani Permasalahan Illegal Fishing*

Keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil pengawas yang menjadi kendala utama dalam mencapai kinerja pengawasan di kabupaten Barito Kuala dapat diminimalisir dengan memanfaatkan nelayan baik sebagai informan maupun sebagai penghalau pelaku illegal fishing di perairan kabupaten Barito Kuala.

Tingkat partisipasi nelayan Pokmaswas Berkat Bersama dalam pengawasan sumberdaya perikanan cukup tinggi, hal ini dilihat dari sikap nelayan Pokmaswas Berkat Bersama yang sebagian besar akan melaporkan ke aparaturnya apabila melihat kegiatan *illegal fishing*, akan menegur dan menasehati, namun partisipasi masyarakat nelayan Pokmaswas Berkat Bersama di Desa Jejangkit dalam pengawasan sumberdaya perikanan terbatas pada daerah sungai dan rawa saja

*Membandingkan Tingkat Pendapatan Masyarakat Nelayan Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Pokmaswas Terhadap Illegal Fishing*

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa total produksi tangkapan ikan sebelum dan sesudah terjadinya illegal fishing mengalami perbedaan. Nilai rata-rata produksi tangkapan nelayan Pokmaswas Berkat Bersama tahun 2005 sebesar 12.631 kg sedangkan sesudah terjadi *illegal fishing* tahun 2014 hanya sebesar 3.642 kg sehingga mengalami penurunan sebesar 58%. Hasil ini dibuktikan pula dengan hasil pengujian secara analisa statistik melalui uji T.

Hasil uji T menunjukkan bahwa produksi tangkapan ikan sebelum dan sesudah terjadinya illegal fishing berbeda secara nyata. Hal ini terlihat dari nilai t hitung  $5,043 > t$  tabel 1,645. Begitupula dari nilai probabilitasnya juga menunjukkan hal yang serupa, dimana nilai sig. (2-tailed) yakni  $0,00 < 0,05$ .

Dengan demikian, Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel produksi penangkapan sebelum dan sesudah terjadinya illegal fishing memiliki perbedaan secara nyata/signifikan pada taraf uji 95%.

Hasil di lokasi penelitian melalui wawancara dan kuisioner secara langsung didapatkan bahwa masyarakat Pokmaswas Berkat Bersama di Desa Jejangkit selama periode 2005 – 2014 mereka mengatakan produksi tangkapan ikan mereka menurun karena hasil tangkapan berkurang, hal ini dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5. Hasil tangkapan ikan selama tahun 2005 – 2014 mengalami penurunan diakibatkan adanya illegal fishing. Para responden mengatakan selama musim air pasang (air dalam) ikan-ikan berkurang karena para responden di Jejangkit mengandalkan hanya pada musim kemarau baru bisa panen dengan hasil tangkapan ikan yang cukup lumayan. Ikan-ikan hasil tangkapan di daerah penelitian adalah ikan gabus (haruan), betok (papuyu) dan sepat rawa (sepat kecil).

Tabel 2. Total produksi tangkapan ikan sebelum dan sesudah terjadinya illegal fishing.

No Responden	Jumlah Produksi tangkapan (tiga bulan/tahun)			
	Produksi Tangkapan (kg) Tahun 2005	Produksi Tangkapan (kg) Tahun 2014	Selisih (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)
1	1777	300	(1,477)	(83.12)
2	890	250	(640)	(71.91)
3	751	148	(603)	(80.29)
4	655	125	(530)	(80.92)
5	660	115	(545)	(82.58)
6	540	90	(450)	(83.33)
7	768	155	(613)	(79.82)
8	173	75	(98)	(56.65)
9	305	100	(205)	(67.21)
10	455	117	(338)	(74.29)
11	403	115	(288)	(71.46)
12	142	70	(72)	(50.70)
13	369	125	(244)	(66.12)
14	433	110	(323)	(74.60)
15	900	140	(760)	(84.44)
16	155	55	(100)	(64.52)
17	183	68	(115)	(62.84)
18	498	155	(343)	(68.88)
19	208	80	(128)	(61.54)
20	278	62	(216)	(77.70)
21	246	93	(153)	(62.20)
22	230	104	(126)	(54.78)
23	161	95	(66)	(40.99)
24	131	109	(22)	(16.79)
25	110	89	(21)	(19.09)
26	53	31	(22)	(41.51)
27	266	130	(136)	(51.13)
28	54	42	(12)	(22.22)
29	191	88	(103)	(53.93)
30	158	92	(66)	(41.77)
31	107	90	(17)	(15.89)
32	102	75	(27)	(26.47)
33	128	84	(44)	(34.38)
34	76	34	(42)	(55.26)
35	75	31	(44)	(58.67)
<b>Jumlah</b>	<b>12,631</b>	<b>3,642</b>	<b>(8,989)</b>	<b>(2,038)</b>
<b>Rerata</b>	<b>361</b>	<b>104</b>	<b>(257)</b>	<b>(58)</b>

Tabel 2 memperlihatkan bahwa produksi tangkapan ikan dengan terjadinya illegal fishing selama tahun 2005 - 2014 mengalami penurunan sebesar 58%. Hal ini disebabkan adanya penangkapan ikan secara berlebihan baik tangkapan secara legal maupun secara illegal, terutama yang menggunakan alat tangkap setrum.

## KESIMPULAN

1. Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Barito Kuala memiliki sarana dan prasarana yang diperuntukan untuk pengawasan sumberdaya ikan di samping itu melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengawasan sumberdaya ikan, baik melalui kegiatan patroli, melakukan penegakan hukum oleh aparat pengawas bidang perikanan, sosialisasi sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS) namun pelanggaran tetap terjadi sehingga memberikan kesan ketidak efektifan atau tidak optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam pencegahan dan penanganan *illegal fishing*, hal ini juga disebabkan karena faktor pemahaman masyarakatnya yang kurang dan yang mendasar adalah karena faktor perekonomiannya.
2. Tingkat partisipasi nelayan Pokmaswas Berkat Bersama dalam pengawasan sumberdaya perikanan cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari sikap nelayan Pokmaswas Berkat Bersama yang sebagian besar akan melaporkan ke aparat pengawas apabila melihat kegiatan *illegal fishing*, akan menegur dan menasehati, serta pernah mendiskusikan masalah *illegal fishing* dengan temannya dan mengatakan bahwa mereka bersedia kalau dilibatkan dalam rapat yang membahas mengenai *illegal fishing*. Namun partisipasi masyarakat nelayan Pokmaswas Berkat Bersama di Desa Jejangkit dalam pengawasan sumberdaya perikanan

terbatas pada daerah sungai dan rawa saja.

3. Ada perbedaan produksi tangkapan ikan sebelum dan sesudah terjadi *illegal fishing*, dimana tahun 2005 sebelum ada *illegal fishing* rata-rata produksi tangkapan ikan sebesar 12.631 kg sedangkan sesudah terjadi *illegal fishing* tahun 2014 hanya sebesar 3.642 kg sehingga mengalami penurunan sebesar 58%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. (2014). Buku Saku Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. (2015). Buku Saku Pokmaswas Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dinas Perikanan dan Kelautan. (2015). *Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2014*. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala.
- Direktorat Jenderal P2SDKP. (2008). Kebijakan dan Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Diambil dari <http://www.dkp.go.id>. [22 Desember 2015].